

MENGAGAS INDONESIA YANG BERKEADILAN MELALUI PEMBANGUNAN INKLUSIF¹

**Prof.Dr.Henny Warsilah, DEA2
PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN
KEBUDAYAAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
hennywarsilah@gmail.com**

Abstrak

Sejak Orde Baru lengser, tak terasa 17 tahun sudah reformasi berjalan, namun menurut pendapat beberapa ahli dan masyarakat umum kondisi reformasi itu belum memberikan ruang yang baik untuk tumbuhnya Indonesia yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Dalam rentang tahun yang terbilang lama itu, Indonesia disinyalir belum mampu tumbuh menjadi bangsa yang menaruh kepentingan warga di atas kepentingan negara dan privat sector dalam proses pembangunannya. Posisi ini memunculkan banyak ketimpangan di mana-mana, baik di sector ekonomi, politik, hukum dan sosial serta lingkungan. Dari aspek perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak saja memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga membawa dampak negatif, yakni semakin maraknya KKN, terutama korupsi di berbagai lini kehidupan. Kasus korupsi yang paling masif dan besar justru terjadi di Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pejabat Pemerintahan Daerah yang seharusnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang paling bermatabat. Pada posisi ini perangkat hukum seolah-olah sudah tumpul, tidak mampu mencegah orang untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Terjadi ironi dan ketimpangan yang parah, jika rakyat karena lapar terpaksa harus mencuri setandan pisang atau ubi kayu tetapi malah dihukum berat, sementara koruptor yang menjarah uang Negara milyaran bahkan triliyunan rupiah dihukum ringan

¹ Disampaikan pada acara Seminar Nasional Indonesia yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi

Diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Pada tanggal 19 Oktober 2016.

² Peneliti Pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI).

dan dengan bangganya memamerkan hasil kejahatannya. Pada posisi ini, hukum dianggap tidak adil karena tidak mampu memberi efek jera, misal dengan cara memiskinkan koruptor.

Praktik hukum yang berat sebelah itu menyebabkan relasi kemasyarakatan menjadi terganggu, imbasnya adalah tidak terwujudnya keadilan. Dari aspek sosial budaya, ragam dan sektor kehidupan berbangsa tidak jauh beranjak dari persoalan-persoalan fundamental kebangsaan. Misal, kita masih berkuat pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan, penyelesaian konflik sosial, dan upaya meminimalisir kekerasan yang tumbuh subur dalam alam demokrasi. Secara politik, kita mengalami perlambatan, politik rente masih mendominasi terutama pada ajang Pilkada, politik yang harusnya mampu mencerdaskan dan membebaskan masyarakat dari kebodohan dan ketertindasan, seolah hanya jalan di tempat. Proses eksklusi sosial justru kian banyak terjadi yang menghasilkan suatu proses marginalisasi dan pemiskinan masyarakat.

Dalam bidang lingkungan hidup, pembangunan di kawasan pesisir, pulau terpencil dan hutan justru menumbuhkan ekonomi kapitalistik. Kelapa sawit melalui perluasan perkebunan-perkebunan telah mengambil lahan-lahan pertanian adat yang produktif. Perkebunan kelapa sawit menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang paling dianggap berhasil. Dampaknya, masyarakat bertambah miskin, kehilangan hak atas tanah, dan munculnya krisis air bersih. Karena kelapa sawit, merupakan tanaman yang boros air. Proyek reklamasi pantai secara besar-besaran seperti di Jakarta Utara, dianggap merusak ekosistem laut dan pesisir dan berakibat memarginalkan masyarakat lokal.

Indonesia saat ini membutuhkan suatu perubahan paradigma pembangunan, dari pembangunan eksklusif yang berorientasi pada ekonomi dengan output mengejar pertumbuhan ekonomi, kepada paradigma Pembangunan Inklusif yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat luas. Jika Indonesia ingin terbebas dari kondisi-kondisi yang mengikat seperti tergambar di atas, sudah saatnya menjadikan Pembangunan Inklusif sebagai suatu kebutuhan bersama di segala bidang. Makalah pendek ini berkeinginan menawarkan paradigma pembangunan inklusif untuk mengatasi kondisi-kondisi eksklusi sosial yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Atau dapat dinyatakan untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan sosial tanpa diskriminasi seyogianya paradigma pembangunan inklusif menjadi pondasi utama.

Kata Kunci: Pembangunan Berkeadilan, Eksklusi Social, Pembangunan Inklusif.

IDEAS ACHIEVING FAIR INDONESIA THROUGH INCLUSIVE DEVELOPMENT

Abstract

Since the New Order stepped down, do not feel 17 years after the reform goes, but in the opinion of some experts and the general public that reform conditions have not given a good room for the growth of Indonesian justice without discrimination. In the span of years is fairly old, Indonesia allegedly not been able to grow into a nation that put the interests of citizens above the interests of the state and the private sector in the development process. This position raises a lot of inequality everywhere, both in the economic sector, political, legal, social and environmental. From the aspect of economic development, economic growth is not only a positive effect on economic growth, but also bring negative measles namely the rampant corruption, especially corruption in various aspects of life. Corruption is the most massive and great is happening in The Council of Representatives and Regional Government officials are supposed as the holder of sovereignty by the people most dignity. In this position the device as if the law has been blunt, do not prevent people to commit a crime of corruption. Irony and imbalances that occur in, if people just steal a bunch of bananas or cassava to eat severely punished, while the criminals proudly showing off the proceeds of crime. Law is considered unfair because it is not able to provide a deterrent effect, for example by means of impoverishing corruptors.

Since the practice of law lopsided it causes social relations to be disrupted, the impact is not a fair deal. From the socio-cultural aspects, types and sectors of national life not far depart from the fundamental national issues. Suppose we are still struggling in the effort to fulfill their food needs, resolving social conflicts, and efforts to minimize violence thrives in a democracy. Politically too, we experienced a slowdown, political rents which still dominates, especially in elections, politics should be able to educate and liberate people from ignorance and oppression, as if just

walking on the spot. The process of social exclusion actually more occur that results in a process of marginalization and impoverishment of society.

In the field of environment, development in coastal areas, small islands and forest have been growing capitalist economy. Through the expansion of palm plantations have taken agricultural lands of indigenous productive. Oil palm plantations become the engine of economic growth most considered successful. Impact, people getting poorer, losing land rights, and the emergence of clean water crisis. Because oil palm, a plant which is wasteful of water. Beach reclamation project as big as in North Jakarta, considered damaging marine and coastal ecosystems and consequently marginalize local communities.

Indonesia currently requires a change in the development paradigm, from development-oriented economy with output pursuit of economic growth, the Inclusive Development paradigm that aim for the welfare of society at large. If Indonesia wants to be rid of binding conditions as illustrated above, it is time to make the Development Inclusive as a common need in all fields. This short paper intends to offer inclusive development paradigm to address the conditions of social exclusion that have been developed in the community due to the development paradigm that is too biased economy. Or may be expressed to achieve Indonesian social justice without discrimination paradigm of inclusive development should be the main foundation.

Keywords: Equitable Development, Social exclusion, Inclusive Development.

A. PENGANTAR

Terlintas pertanyaan besar dalam benak, ketika diminta menjadi panelis pada acara Semnas Indonesia Berkeadilan Tanpa Diskriminasi yang bergengsi ini oleh rekan Dr. Agus Santosa sohib di FISIP-UGM, sesungguhnya Indonesia yang berkeadilan sosial itu wujudnya seperti apa? dan permasalahan apa saja yang muncul untuk menuju kepada Indonesia yang berkeadilan sosial tanpa dikriminasi itu?

Selama ini Indonesia menyandang identitas, sebagai suatu negara berkeadilan sosial yang berlandaskan Pancasila. Identitas negara itu telah tertuang dalam tujuan bernegara yang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: **melindungi segenap bangsa dan seluruh**

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai suatu negara yang berkeadilan sosial, maka negara berkewajiban melindungi hak-hak asasi warganya, sebaliknya warga negara berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama.

Pengejawantahan Indonesia yang berkeadilan sosial itu, menurut hemat kami bisa ditelusuri melalui berjalannya pembangunan dalam segala aspek dengan tujuan perbaikan mutu kesejahteraan dan memberi keadilan bagi seluruh masyarakatnya. Pada hakekatnya, jika pembangunan hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, maka hanya GDP yang menjadi ukuran kesuksesan, sementara itu aspek kesejahteraan sosial dan keadilan sosial tidak menjadi tujuan utama. Dalam banyak contoh, terkadang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun tanpa pemerataan kesejahteraan dan disertai dengan tingginya angka pengangguran, tingkat kemiskinan yang tinggi, dan angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan.

Seperti kita ketahui bersama, garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2009, tercatat sebesar Rp 200.262 per kapita per bulan, dan rata-rata dari garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp 222.123 per kapita per bulan, sedang di perdesaan sebesar Rp 179.834 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini mengalami peningkatan setiap tahun seiring dengan terjadinya inflasi, sehingga penduduk yang memiliki pendapatan mendekati garis kemiskinan sangat rentan untuk jatuh miskin apabila terjadi fluktuasi ekonomi, seperti kenaikan harga bahan bakar dan bahan pangan. Sebagai contoh, jika digunakan garis kemiskinan USD 1 per kapita per hari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 5,9 persen dari populasi. Namun, jika garis kemiskinan ditingkatkan menjadi USD 2 per kapita per hari, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun yang sama melonjak menjadi 42,6 persen dari populasi. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin per Maret 2016 mencapai 28 juta jiwa atau 10,86 persen dari total penduduk Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin,

Anggaran Kemiskinan, dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2006-2016

No.	Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2016
1.	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	39,3	37,1	34,9	32,5	31,0	28 jt
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	17,7	16,5	15,4	14,1	13,3	10,86
3.	Anggaran Kemiskinan (Rp Triliun)	42	51	63	66	94	-
4.	Pengangguran (%)	10,3	9,1	8,4	7,9	7,4	-

Sumber: BPS, 2006 dan 2010.

Saat ini Indonesia, merupakan negara yang tergolong dalam *medium human development*, rasio antara 10 persen penduduk terkaya terhadap 10 persen penduduk termiskin di Indonesia mencapai 7,8 pada tahun 2005. Selanjutnya rasio antara 20 persen penduduk terkaya terhadap 20 persen penduduk termiskin pada tahun yang sama adalah 5,2. Secara umum, kondisi distribusi dan ketimpangan pendapatan/pengeluaran di Indonesia tidak mengalami perbaikan yang berarti dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pusat Statistik mencatat gini ratio Indonesia per Maret 2016 sebesar 0,397 persen. Angka koefisien gini ini lebih rendah dibandingkan periode September 2015 sebesar yang mencapai 0,402 persen. Dan, berdasarkan klasifikasi daerah, BPS mencatat gini ratio di perkotaan menurun dari September 2015 sebesar 0,419 menjadi 0,410 pada Maret 2016. Sedangkan di pedesaan, gini ratio pada September 2015 sebesar 0,329 menjadi 0,327 pada Maret 2010. Adapun penyebab utama dari turunnya gini ratio di antaranya adalah telah terjadi peningkatan pengeluaran untuk kelompok 40 persen menengah, sementara 20 berpengeluaran tertinggi malah terjadi penurunan, artinya ada pemerataan. Ini menandakan ketimpangan orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah.

Tabel 2 . Gini Rasio di Indonesia Menurut Daerah Tahun 2005-2016

Tahun	Gini Rasio		
	Kota	Desa	Kota+Desa
2005	0,338	0,264	0,343
2006	0,350	0,276	0,357
2007	0,374	0,302	0,376
2008	0,367	0,300	0,368

2015	0,419	0,327	0,402
2016	0,410	0,327	0,397

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Apabila dibandingkan dengan capaian pembangunan di negara-negara lain, posisi Indonesia belum dapat dibanggakan, kecuali dalam hal populasi dan PDB. Kondisi ini cukup ironis, mengingat Indonesia memiliki sumber daya yang jauh lebih melimpah jika dibandingkan dengan hampir semua negara, tetapi negara-negara tersebut memiliki kinerja pembangunan lebih baik. Fenomena ini menjadi tantangan bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan pembangunan lainnya, untuk mencapai visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dapat diwujudkan pada kurun waktu yang ditetapkan.

Tabel 3. Peringkat Indikator Pembangunan Indonesia Dibandingkan Negara Lain

No.	Indikator (Tahun)	Peringkat Indonesia	Jumlah Negara
1.	Indeks Daya Saing (GCI) (2010-2011)	44	139
2.	Infrastruktur (2010-2011)	82	139
3.	Kesehatan dan Pendidikan Dasar (2010-2011)	62	139
4.	Angka Kematian Bayi (2010-2011)	97	139
5.	Angka Harapan Hidup (2010-2011)	91	139
6.	Kualitas Pendidikan Dasar (2010-2011)	55	139
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (2010)	108	169
8.	Indeks Persepsi Korupsi (CPI) (2010)	110	178
9.	Risiko Kegagalan Negara (2010)	61	178
10.	Indeks Pembangunan Pendidikan (EDI) (2010)	65	128
11.	Jumlah Penduduk (237,6 juta orang) (2010)	4	237
12.	PDB (USD 1.033 triliun) (2010)	16	237
13.	PDB Per Kapita (USD 4,300) (2010)	154	237
14.	Pengangguran (7,1%) (2010)	75	237

Sumber: Kompas, Jumat, 20 Mei 2011.

Pada tingkat ASEAN, berdasarkan tahun 2014 peringkat Indonesia turun 16 peringkat dari peringkat ke-25 pada tahun 2014 menjadi peringkat ke-41 pada tahun 2015. Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Posisi Indonesia juga hanya sedikit lebih baik dari Filipina. Peringkat ini dihitung dengan bobot tertentu dengan mempertimbangkan tiga faktor yaitu faktor pengembangan dan investasi, faktor daya tarik suatu negara, dan faktor kesiapan sumber daya manusia.

Faktor kesiapan tenaga kerja Indonesia dirasa masih kurang bersaing dari negara lain di tahun 2015. Untuk faktor ini, Indonesia hanya unggul dalam pertumbuhan angkatan kerja saja dimana Indonesia menduduki peringkat kelima. Indikator lainnya, seperti pengalaman internasional, kompetensi senior manajer, sistem pendidikan, pendidikan manajerial, dan pada keterampilan bahasa berada pada peringkat di atas 30. Bahkan untuk keterampilan keuangan, Indonesia berada pada peringkat ke-44. Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya peningkatan kesiapan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya adalah adanya dibentuknya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal ini dilatarbelakangi adanya amanah UUD 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya 20% Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk fungsi pendidikan. Melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa sebagian dari dana fungsi pendidikan dijadikan sebagai Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola dengan mekanisme pengelolaan dana abadi (*endowment fund*) oleh sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah melakukan upaya peningkatan kesiapan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya adalah adanya dibentuknya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal ini dilatarbelakangi adanya amanah UUD 1945 mengamanahkan bahwa sekurang-kurangnya 20% Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk fungsi pendidikan. Selain ketidaksiapan SDM dan pendidikan, ketidaksetaraan pembangunan jelas menjadi efek dari model pembangunan eksklusif yang selama ini dijalankan, dimana aset terbesar hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang. Kondisi demikian ini, melahirkan kelompok-kelompok orang yang terpinggirkan dari proses pembangunan karena perbedaan jenis kelamin, etnis, usia, orientasi seksual, pendidikan rendah, kecacatan atau kemiskinan. Dapat dikatakan paradigma pembangunan yang hanya bertumpu pada pembangunan

ekonomi semata, akan menghasikan suatu kondisi social exclusion. Eksklusi sosial adalah proses dimana partisipasi dan solidaritas masyarakat menurun. Kondisi demikian, mencerminkan kurang memadainya kohesi sosial dan integrasi sosial, atau dapat dimaknai sebagai berlakunya diskriminasi dalam kehidupan sosial. Pada tingkat individual, eksklusi sosial mengacu pada ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membangun makna hubungan sosial.³

Istilah eksklusi sosial pertama kali digunakan oleh Rene Lenoir (1974) dalam karyanya yang berjudul “*Les Exclus: Un Francais Sur Dix*”, di mana istilah ini digunakan untuk merujuk kepada orang-orang termajinalkan dari arus utama masyarakat di Perancis dan menjadi miskin⁴. Konsep eksklusi sosial dan inklusi sosial menonjol dalam wacana kebijakan di Perancis pada pertengahan 1970-an. Konsep ini kemudian diadopsi oleh Uni Eropa pada akhir 1980-an sebagai konsep kunci dalam kebijakan sosial. Konsep eksklusi dan inklusi sosial menyebar ke Negara-negara berkembang, dengan cara melakukan redefinisi konsep pembangunan ekonomi yang juga harus bertumpu kepada pendekatan sosial. Secara lebih luas, Eksklusi sosial adalah proses multi-dimensional, di mana berbagai bentuk pengucilan digabungkan, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses politik, akses terhadap pekerjaan dan sumber daya material, dan integrasi ke dalam proses budaya umum. Ketika dikombinasikan, mereka menciptakan bentuk-bentuk akut pengecualian yang menemukan manifestasi spasial di lingkungan tertentu (Madanipour seperti dikutip Byrne, 2005). Sedang menurut Giddens (2012), konsep eksklusi sosial mencerminkan **suatu kondisi ketiadaan akses ekonomi, sosial dan politik dari individu dan kelompok terhadap sumber daya sosial, politik, ekonomi dan sumber daya alam.**

Konsep pembangunan sosial menekankan pada banyak hal yang harus diperjuangkan, seperti pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesehatan dan standar nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kondisi lingkungan, pemerataan kesempatan, kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya. Seperti halnya, pembangunan di ruang kota sejauh ini menghasilkan kesejahteraan untuk sebagian kecil warga kota, dan kondisi

3. Gordon D et .al (2000).Poverty and Social Exclusion in Britain. Joseph Rowntree Foundation,York.

4. Rene Lenoir, 1974. *Les Exclus: Un Francais Sur Dix*. Paris:Seuil Publication.

deprivasi sosial untuk sebagian besar warganya. Kondisi demikian disebabkan penetapan paradigma pembangunan yang terlalu bertumpu kepada pembangunan ekonomi dengan capaian pertumbuhan ekonomi. Kapitalisasi ruang kota telah menyebabkan rusaknya tatanan sosial masyarakat kota, masyarakat menjadi asing satu sama lain dan kehilangan kontak dengan tetangga di sebelah, apalagi dengan saudara-sebangsa di pulau lain, padahal transportasi dan telekomunikasi sudah semakin modern. Ikatan-ikatan sosial yang inklusif dan kebhinekaan telah diganti oleh pengelompokan eksklusif berdasarkan kaidah-kaidah yang dangkal dan untuk kepentingan individu. Dan, uang telah menggantikan ucapan salam yang kita sampaikan ketika berjumpa sesama. Fasilitas material menggantikan jabat tangan hangat antara orang-orang yang bekerja bersama. Keanggotaan sebuah klub eksklusif menjadi lebih penting daripada kewarga-negaraan (*citizenry*) (Warsilah:2014).

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara terus-menerus. Perubahan yang dimaksudkan adalah perbaikan-perbaikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pembangunan sangat kompleks, karena mencakup semua aspek kuantitatif maupun kualitatif di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Di samping itu, dengan sumber daya pemerintah yang relatif terbatas, maka partisipasi pemangku kepentingan lain di dalam mendukung pembangunan adalah sangat vital. Sebagai contoh, kontribusi belanja pemerintah dalam membentuk kue ekonomi nasional yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) relatif kecil apabila dibandingkan dengan komponen lain, yaitu konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan ekspor neto.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan, bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya dimaksud dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Definisi ini merepresentasikan kesadaran pemerintah bahwa pembangunan bersifat lintas bidang, sehingga harus dijalankan dengan memberdayakan semua potensi bangsa.

Dengan memahami konsep pembangunan, maka secara implisit didalamnya telah terkandung konteks dari beragam terminologi, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang

inklusif, pembangunan yang berkelanjutan, dan pembangunan yang berkeadilan. Suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas jika pertumbuhan ekonominya dicapai dengan fundamental ekonomi yang kuat, sehingga mampu beradaptasi dengan fluktuasi internal maupun eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dengan melibatkan sebanyak mungkin penduduk di dalam aktivitas perekonomian. Adapun pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak melampaui kemampuannya untuk pulih.

Meskipun beririsan dengan terminologi-terminologi yang lain, pembangunan yang berkeadilan mempunyai dua kata kunci, yaitu akses dan pemberdayaan. Akses bermakna bahwa masyarakat dari berbagai golongan pendapatan, suku, agama, ras, gender, dan usia, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia selayaknya dapat dengan mudah menjangkau dan menikmati pelayanan dasar dan sumber-sumber ekonomi. Fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan jaringan jalan merupakan contoh fasilitas yang harus tersedia secara relatif murah, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Sedangkan pemberdayaan mengandung pengertian keberpihakan dari penyelenggara negara kepada golongan masyarakat yang kurang beruntung, seperti dalam hal mendapatkan pembiayaan untuk memulai dan menjalankan kegiatan ekonomi berskala mikro dan kecil.

Untuk mencapainya, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan. Aparatur pemerintah dan penegak hukum harus memegang teguh prinsip-prinsip umum pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ketergantungan kepada pembiayaan pembangunan yang bersumber dari luar negeri harus dibatasi dan sebaliknya pembiayaan dari dalam negeri perlu ditingkatkan. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara mandiri juga perlu diperkuat.

Kertas kerja ini menekankan, untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan penting kiranya kita merubah kondisi *social exclusion* menjadi *social inclusion*, yakni menggunakan paradigma pembangunan Inklusif.

Tabel 4. Paradigma Pembangunan di Negara Neolib, Sosial demokratik & Inklusif

VARIABEL/ FAKTOR	NEOLIBERAL	SOSIAL- DEMOKRATIK	PEMBANGUNAN INKLUSIF /PI
PERTUMBUHAN	TUJUAN	SARANA	SARANA
PERAN PASAR	UTAMA	PENTING	PENTING
PERAN NEGARA	MINIMAL	PENTING	PENTING
STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN & KETIMPANGAN	PASIF	AKTIF	PROAKTIF
TITIK SOLIDARITAS	PASAR	NEGARA	NEGARA & MASYARAKAT

B. PEMBANGUNAN INKLUSIF UNTUK INDONESIA YANG BERKEADILAN

Sejak awal tahun 80-an para sosiolog terutama di Eropa mulai melakukan kritik terhadap model pembangunan ekonomi, dan menawarkan pendekatan sosial yang lebih mampu memotret permasalahan sosial yakni melalui pendekatan modal sosial dan inklusi sosial (*social exclusion*). Karena sering dilupakan bahwa, sebagaimana relasi sosial (relasi antar manusia) pada umumnya, hampir selalu melibatkan modal sosial (*social capital*).

Pengertian inklusi sosial digunakan sebagai **sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya**. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Jadi, **lingkungan inklusi adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga**

masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan / non diskriminatif (Rene Lenoir, 1974).

Pembangunan inklusif bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan dan diskriminasi (ini sama dengan model pembangunan yang berkeadilan non diskriminatif). Pembangunan inklusif bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara. Tujuannya pembangunan inklusif adalah untuk berbagi manfaat hasil-hasil pembangunan, dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan. Seluruh proses pembangunan ini didasarkan pada penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pada tatanan ini untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan tanpa diskriminasi pembangunan harus menggunakan model pembangunan inklusif.

Sebetulnya pendekatan pembangunan inklusif hampir bersamaan digunakan dengan pendekatan modal sosial. Bank Dunia dalam laporan tahunannya yang berjudul "Entering the 21st Century", mengungkapkan bahwa modal sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap proses-proses pembangunan (World Bank, 2000). Konsep yang dikembangkan oleh World Bank dengan menggunakan modal sosial sebagai dasar pembangunan didasari pada asumsi berikut (World Bank, 1998):

- (a) Modal sosial berada dalam seluruh keterkaitan ekonomi, sosial, dan politik, serta hubungan sosial (*social relationships*) mempengaruhi bagaimana pasar dan negara bekerja, dan sebaliknya pasar dan negara juga akan membentuk bagaimana modal sosial di masyarakat bersangkutan;
- (b) Hubungan yang stabil antar aktor dapat mendorong keefektifan dan efisiensi baik perilaku kolektif maupun individual;
- (c) Modal sosial dalam satu masyarakat dapat diperkuat, namun membutuhkan dukungan sumber daya tertentu untuk memperkuatnya; dan
- (d) Agar tercipta hubungan sosial dan kelembagaan yang baik, maka anggota masyarakat mesti mendukungnya.

Strategi utama pembangunan inklusif dari aspek sosial yang paling utama adalah penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk

melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Selain itu, pelibatan partisipasi publik dalam setiap proses pembangunan sangatlah penting, karena **ruh dari pembangunan inklusif adalah partisipasi publik**.

Berikut parameter pembangunan inklusif yang dapat menjadi acuan:

Tabel 5. Parameter Pembangunan Inklusif

No	Parameter Pembangunan	Tujuan
1	Inklusi Social (Social Inclusion)	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan • Mengajak masuk semua entitas masyarakat (Ras, etnik, golongan dan Agama) • Pelibatan Publik, khususnya miskin dan marginal dalam proses pembangunan. • Kelembagaan social sebagai media • Akses ke pembangunan social • Pendidikan inklusif (termasuk untuk kelompok difabel) • Kesehatan Inklusif (terutama wanita dan anak-anak). • Menciptakan kewarganegaraan yang inklusif, dimana secara structural mendistribusikan Nasionalisme dan secara kultural meminalisir in toleransi
2	Ekonomi Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi inklusif tujuan untuk mensejahterakan masyarakat • Menurunkan kemiskinan, • Menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan dan • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja, seluruh wiayah terutama

		<p>Indonesia Bagian Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serta untuk menganalisis dampak pertumbuhan inklusif terhadap pertumbuhan kelas menengah . • Akses ekonomi terbuka • Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif (financial inclusion).
3	Hukum Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan hak ekonomi, social, politik dan budaya (Ekosob) • Memberi keadilan yang setara untuk semua golongan, ras, etnik dan agama • Akses terhadap keadilan/hukum • Memperluas dan memperdalam demokrasi dengan cara merealisasikan prinsip-prinsip hukum dan HAM
4	Politik Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Demokrasi • Kebebasan untuk berkelompok, berserikat, parpol • Akses ke dunia politik terjamin • Politik berkeadilan melalui [politik pembangunan (developmentalisme) yang intinya distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat
5	Budaya Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> • Menghargai perbedaan sebagai aset kekayaan dalam dinamika hidup keseharian. • Budaya inklusif merupakan kebutuhan manusia terhadap kebenaran, dan nilai-nilai keadilan (Taylor) • Mengembangkan kepribadian dan wawasan berfikir. Kebudayaan diciptakan manusia dengan tujuan

		<p>untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mempertahankan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Multikulturalisme
6	Pendidikan Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar siswa-siswanya berhasil. ▪ Pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus atau anak luar biasa di sekolah atau lembaga pendidikan (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak) bersama dengan teman-teman sebayanya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh anak (Tim Pendidikan Inklusi Jawa Barat, 2003:4).

Sementara itu, paradigma pembangunan inklusif dari aspek pertumbuhan ekonomi berupa penciptaan sistem keuangan yang inklusif, karena pertumbuhan ekonomi sangat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan mengurangi perbedaan pendapatan. Sebuah sistem keuangan yang efisien dan inklusif akan memberdayakan individu, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dengan perekonomian serta memberi perlindungan terhadap guncangan

ekonomi. Ahmad dan Malik (2009) mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan berpengaruh positif pada GDP per kapita melalui alokasi dana yang efisien dan meningkatkan output per pekerja serta dapat mengundang masuknya modal asing. Hal ini mengingat bahwa sistem keuangan dapat menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, dan dapat mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi (Levina, 1997).

Dari aspek hukum yang inklusif, negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Dan, sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu: pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dalam hidup bersama baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu keadilan (Keadilan Sosial). Keadilan sosial itu meliputi tiga hal, yaitu : keadilan distributif (keadilan membagi), yaitu negara terhadap warganya, keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu warga terhadap negaranya untuk mentaati peraturan perundangan, dan keadilan komutatif (keadilan antarsesama warga negara), yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik (Notonagoro, 1975).

Secara sosial, kelembagaan sosial harus inklusif, dimana bentukannya berdasarakan kepentingan masyarakat bukan kepentingan segolongan orang. Dan capaian kelembagaan sosial untuk mempermudah kehidupan sosial dan sebagai media mendorong terwujudnya kohesi sosial, interaksi sosial, dan media penyelesaian konflik.

Dari sisi aspek kultural, secara budaya pembangunan inklusif bertumpu pada kearifan lokal yang sudah mentradisi, bukan mengganti dengan budaya baru yang tidak memiliki akar. Misal dibangun apartemen, mall, hotel mewah yang peruntukannya bukan bagi masyarakat lokal tetapi bagi pendatang baru yang memiliki kapital belaka. Aspek budaya inklusif bertujuan menumbuhkan kohesi sosial, meminimalisir budaya kekerasan dan diskriminasi. Budaya inklusif menciptakan budaya yang saling menghargai.

C. KESIMPULAN

Pendekatan pembangunan inklusif merupakan tawaran menarik yang patut dicoba jika Negara kita ingin berkeadilan tanpa diskriminasi, pembangunan inklusif menekankan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Wirotomo, pembangunan inklusif itu akan berhasil jika menyertakan variabel struktur, proses sosial dan kultur secara seimbang dan akan berhasil jika para pemimpin kota melakukan reformasi birokrasi terlebih dahulu secara menyeluruh dan melibatkan pihak ketika LSM secara utuh.

Pembangunan inklusif adalah suatu bentuk model pembangunan sosial yang paling mutakhir. Pembangunan inklusif merupakan pembangunan sosial yang menggunakan pendekatan bersifat non sektoral dan ekonomi, meski mekanisme pembangunan memberi budget secara sektoral (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya), tetapi pembangunan haruslah di arahkan ke pembangunan holistik. Konsep pembangunan inklusif dan sosial ini harus diletakkan pada unsur manusia sebagai subyek pembangunan, begitupun fenomena masyarakat dalam bentuk interaksi dan interrelasi dan partisipasi merupakan syarat mutlak keberhasilan konsep pembangunan ini.

Dan sesuai dengan butir-butir Nawacita presiden Joko Widodo yang mencanangkan bahwa Negara harus hadir dalam proses pembangunan, dan pembangunan harus mulai dari pinggiran ke pusat yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dan demokrasi. Tulisan ini mencoba merekonstruksi kembali nilai-nilai pembangunan sesuai dengan konsep inklusi sosial yang bertujuan capaian kualitas hidup, berkembangnya hubungan sosial, kohesi sosial dan partisipasi sosial serta modal sosial.

Referensi

Blakely, Edward J. and Ted K. Bradshaw, 2002. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage Publications.

BPS, 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta.

BPS, 2009. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2009*. Jakarta.

- Wirutomo, Paulus, Agung Pramono, Dody Riyadmadji, Tumpal P. Saragi, dan Naning Mardinia, 2003. *Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Cipruy.
- Sachs, Jeffrey, 2008. *Common Wealth: Economics for a Crowded Planet*. New York: Penguin Books.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom & Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, 2003. *Economic Development, Eight Edition*. Boston: Addison-Wesley.
- UNDP, 2006. *Human Development Report 2006*. New York.
- Wibisono, Yusuf, 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility, Cetakan Kedua*. Gresik: Fascho Publishing.
- (Rakhmindyarto dan Syaifullah, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan(<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/keuangan-inklusif-dan-pengentasan-kemiskinan>)).

